

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Tidak Dibacakan” dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu : (1) Kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah. (2) Akibat hukum terhadap PPAT yang melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan preskripsi terhadap suatu permasalahan hukum. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*).

Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh PPAT bersumber dari Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana PPAT ditunjuk untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah dan Asas Mutakhir yang ditentukan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Ada dua kewenangan yang dimiliki yaitu kewenangan sebagai Pejabat Umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Terhadap kasus PPAT YA, maka akta PPAT akan turun derajatnya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. PPAT YA dapat dikenakan sanksi kode etik dan sanksi administratif.

Kata Kunci : PPAT, Akta PPAT, Akta PPAT yang tidak dibacakan.



## ABSTRACT

The thesis entitled “*Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT yang Tidak Dibacakan* (Legal Consequences of Unread LRO Deeds)” discusses two main issues. They are the authorities owned by a Land Registry Officer (*Petugas Pembuat Akta Tanah/PPAT*) and the legal consequences of LRO deeds that violate the provisions of Article 22 Government Regulation Number 37 Year 1998.

This is a legal study aims to find prescription on legal issues. In this study, the writer applied statute approach, conceptual approach, and case study.

The findings of this study show that the source of authority owned by a Land Registry Officer is stated on Article 6 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997. LRO is appointed to assist the Head of Land Agency in registering land and implementing update principle provisioned on Article 2 Government Regulation Number 28 Year 1997. There are two authorities owned by a LRO, namely authority as a public officer to issue authentic deeds and authority to issue Administrative Court verdict. Related to the case of LRO YA, the deed will be downgraded from an authentic deed to an underhand deed and LRO YA may be charged with code of conduct sanction and administrative sanction.

**Keywords:** LRO, LRO Deed, Unread LRO Deed

